

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ferial dan Siti Ragil Handayani (2016) , meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan efeknya terhadap nilai perusahaan studi pada badan usaha miik negara (BUMN). Dengan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Tertius dan Christiawan (2015), meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada sektor keuangan. Secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.

(Pangabea, 2017), meneliti tentang *The Effect of Good Corporate Governance and Environmental Performance on Financial Performance of the Proper Listed Compan on Indonesia Stock Exchange* dengan hasil komite audit secara parsial memiliki signifikan berpengaruh pada kinerja keuangan, sementara yang lain tidak. Sementara itu, hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan kinerja dan semua

Dari penelitian terdahulu penelitian ini dilakukan dengan mengganti pengukuran *good corporate governance* di indikator pengukuran dewan komisaris dan komite audit merubah dengan frekuensi rapat diharapkan dengan menggunakan frekuensi kehadiran rapat maka akan lebih efisien untuk mengawasi dan menilai kinerja manajemen yang diharapkan akan mencapai kepuasan perusahaan dan para investor.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teori Keagenan

Perusahaan merupakan pusat perjanjian kontrak antara berbagai pihak yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda, yaitu pemegang saham, manajemen yang diwakili oleh manajer, supplier dan pihak-pihak lainnya termasuk calon investor dan karyawan. Teori yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak tersebut (pihak principal dan agent) disebut teori keagenan (*agency theory*). Masalah yang mendasari dari teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan tersebut. Manajer yang disebut agent dan pemilik yang disebut principal merupakan dua pihak yang masing-masing memiliki tujuan berbeda dalam mengendalikan perusahaan terutama mengenai bagaimana memaksimalkan kepuasan dan kepentingan dari hasil yang dicapai melalui aktivitas usaha. (Budiharjo, 2016).

Agency Theory menjelaskan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional untuk menjalankan bisnisnya. Pemisahan kepemilikan ini bertujuan supaya pemilik perusahaan dapat memperoleh untung yang maksimal dengan biaya yang murah. Para agen bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen

perusahaan. Pemegang saham bertugas untuk mengawasi dan memonitoring para agen dalam mengelola perusahaannya. Teori agensi mengkaji dampak dan hubungan para tenaga profesional dengan pemilik perusahaan atau pemilik perusahaan dengan pemberi pinjaman.(ferial, dkk 2016).

b. *Good Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep corporate governance diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), karena adanya corporate governance pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen (Darwis, 2009 dalam widyati, 2013). Sedangkan menurut Prantama, dkk (2015) Tim Good Corporate Governance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjelaskan GCG dari segi soft definition yang lebih mudah dimengerti, yaitu “Komitmen, peraturan main, serta praktek pelaksanaan bisnis secara sehat dan beretika.” Berbagai pengertian tentang GCG tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu sistem pengendalian dan pengaturan organisasi yang dilakukan dengan sebagus mungkin, berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati, untuk kepentingan semua pihak yang berstatuskan dengan organisasi, bagus secara langsung ataupun tidak.

Asas *Good corporate governance*, menurut (FCGI, 2003 dalam Budiharjo, 2016) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan untuk kepentingan

manajemen dan investornya. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing asas GCG yang dikemukakan oleh (FCGI, 2003 dalam Budiharjo 2016).

1. **Transparansi (Transparency)** Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.
2. **Akuntabilitas (Accountability)** Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (Responsibility)** Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Ada beberapa komponen *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direksi dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan tersebut secara jangka pendek atau jangka panjang. Dewan direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar, dan RUPS serta dibawah pengawasan dewan komisaris. (Sulistiyowati, 2017)

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris

diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. (Sulistyowati, 2017)

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 dalam Widyati, 2013). Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ Tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara profesional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan controlling shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. (Widyati, 2013)

4. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Bapepam melalui Surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik

mewajibkan dibentuknya komite audit. Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit. (Widyati, 2013)

c. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah ukuran tingkat perkembangan-perkembangan perusahaan berdasarkan analisa aktivitas-aktivitas dan rasio-rasio keuangan sehingga menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus atau tidak. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan berupa neraca, rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama – sama memberikan suatu gambaran tentang porsi keuangan perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen dimasa mendatang dan risiko atas penilaian investor (Weston dan Copeland, 1997:86). Dengan demikian rugi laba arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen dimasa mendatang dan risiko atas penelian tersebut. Dengan demikian pengukuran kinerja laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat prediksi pertumbuhan kekayaan pemegang saham.(Syari, 2014). Penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat di nilai dengan menggunakan ROA, NPM, ROE, EPTI.

1. *Return On Asset (ROA)*

Return on assets dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (reasobable return) dari aset yang dikuasainya. Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya. Oleh karena itu, *Return on assets* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multinasional (Simamora, 2000)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

Total aktiva

2. *Net Profit Margin (NPM)*

(warsono, 2003 dalam pontoh dkk, 2016) Besarnya perhitungan margin laba bersih menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu. Tujuan perhitungan Marjin Laba Bersih adalah untuk mengukur keberhasilan keseluruhan bisnis suatu perusahaan. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) yang tinggi menunjukkan perusahaan menetapkan harga produknya dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Rasio *Net Profit Margin* ini akan sangat berguna apabila membandingkan profitabilitas pesaing di industri yang sama karena memiliki lingkungan bisnis dan basis pelanggan yang sama serta memiliki struktur biaya yang hampir sama.

Umumnya, meski tergantung pada jenis industri dan struktur bisnisnya, Marjin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* (NPM) dengan persentase lebih dari 10% sudah dianggap sangat baik.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Return Of equity* (ROE)

Menurut Gibson (2001:294),” *Return on equity measures the return to the common stockholders the residual owner*”. Pengembalian laba atas ekuitas yang terdiri dari saham biasa (Return On Common equity) merupakan alat ukur terhadap pengembalian laba kepada pemegang saham biasa. Rasio ini menggambarkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena berarti posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian juga sebaliknya.

Return on equity atau ROE mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan uang dari pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan dan menumbuhkan perusahaannya. Tidak seperti rasio pengembalian investasi lainnya, ROE adalah rasio profitabilitas dari sudut pandang investor, bukan dari sudut pandang perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini menghitung berapa banyak uang yang dapat dihasil oleh perusahaan bersangkutan berdasarkan uang yang diinvestasikan pemegang saham, bukan investasi perusahaan dalam bentuk aset atau sesuatu yang lainnya.

ROE ini sebenarnya dapat digunakan untuk membandingkan antara satu periode dengan periode lainnya. Sebagian besar Investor akan menghitung dan membandingkannya pada awal periode dengan akhir periode untuk melihat perubahan pada pengembalian ekuitasnya. Dengan perbandingan per periode ini, investor dapat melacak dan mengetahui perkembangan dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan tren pendapatan yang positif.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total ekuitas.}}$$

d. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan

Masalah agensi adalah masalah yang terjadi karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Masalah agensi dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap manajemen sehingga manajemen selaku pengelola perusahaan yang memiliki semua informasi perusahaan akan cenderung bertindak menyembunyikan informasi dari pemegang saham. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi manajemen atau direksi. Hubungan ini diperkuat dengan teori dari (Pearce dan Zahra, 1992 dalam widyati, 2013) peningkatan ukuran dewan direksi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Hal ini didukung oleh penelitian Shukeri, Shin dan Shaari (2012) di 300 perusahaan yang listed di Malaysia, yang menemukan hubungan positif signifikan antara ukuran Direksi dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Johl et. al

H1 : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan dalam kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja manajemen.

Hal ini juga sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (sam'ani 2008) Aktivitas dewan komisaris mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Variasi variabel aktivitas dewan komisaris secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel aktivitas dewan komisaris menunjukkan arah yang positif.

Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka fungsi pengawasan terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan (Wardhani, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

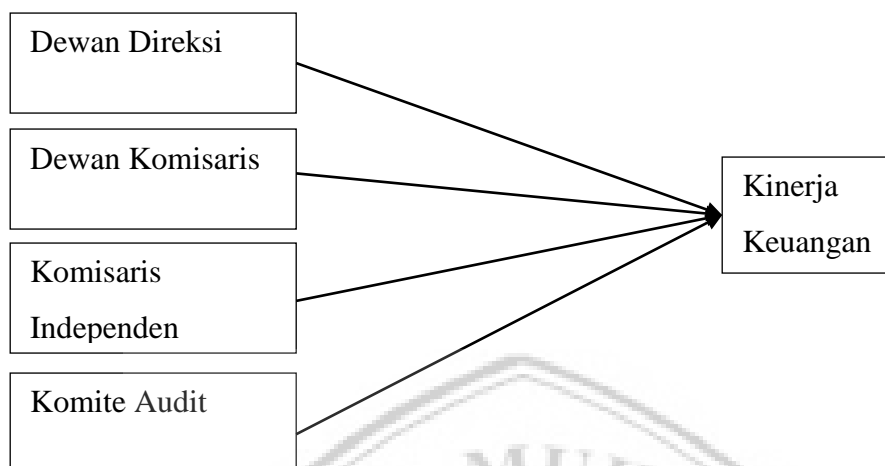
Menurut Ujianto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Komposisi komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bersikap objektif dan mampu melindungi kepentingan stakeholders perusahaan.

H3: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Panggabean (2017), meneliti tentang *The Effect of Good Corporate Governance and Environmental Performance on Financial Performance of the Proper Listed Compan on Indonesia Stock Exchange* dengan hasil komite audit secara parsial memiliki signifikan berpengaruh pada kinerja keuangan .Adapun penelitian terdahulu (Aprianingsih Astri, 2016) yang menyatakan komite audit berpengaruh signifikan dengan kinerja keuangan dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit ke manajemen akan mengurangi tingkat kecurangan.

H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

